

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-undang Keantariksaan di Indonesia dan akibat hukum yang terjadi. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 di Indonesia dan apa akibat hukum yang terjadi dari pengaturan tanggung jawab peluncur benda antariksa dalam hukum nasional di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melalui seleksi data, klasifikasi data dan Sistematika data. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dalam Pasal 83 disebutkan bahwasannya pada pasal tersebut akan mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara serta ganti rugi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada seharusnya Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah lanjutan dari Pasal 83 Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan agar Implementasi Undang-Undang Keantariksaan tersebut menjadi jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Salah satu Faktor terbesar penyebab potensi keantariksaan di Indonesia masih juga belum dimanfaatkan secara optimal yaitu masyarakat dan pemerintah yang kurang mengoptimalkan potensi keantariksaan Indonesia serta juga kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Analisis, Antariksa, Keantariksaa,

## ABSTRACT

*This study discusses the application of Law no. 21 of 2013 concerning Space in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the application of the Space Law in Indonesia and the legal consequences that occur. The main problem of this research is how to regulate the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2013 in Indonesia and what are the legal consequences that occur from regulating the responsibility of launching space objects in national law in Indonesia. To answer these problems, the author uses the juridical-normative research method, using the conceptual approach, statutory approach, case approach and historical approach. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. And the method of processing legal materials is carried out through data selection, data classification and data systematics. The results of this study show that Law Number 21 of 2013 concerning Space in Article 83 states that this article will further regulate state responsibility and compensation which will be regulated in Government Regulations but until now the Government Regulations referred to do not exist, Indonesia should immediately issue a Government Regulation following Article 83 of Law No. 21 of 2013 concerning Space so that the implementation of the Space Law is clear and does not cause confusion. One of the biggest factors causing space potential in Indonesia is still not optimally utilized, namely the community and government that are not optimizing Indonesia's space potential as well as a lack of awareness and community involvement.*

**Keywords:** Analysis, Space, Space,